



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan Sukonandi Nomor 8 Yogyakarta Kode Pos 55166
Telepon/Faksimile (+62274) 513492; Surel
kanwldiy@kemenag.go.id Situs : <https://diy.kemenag.go.id>

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

BERITA ACARA UJI KONSEKUENSI

NOMOR: B-1098/Kw.12.1/HM.01/07/2026

Dalam rangka melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik, pada hari Senin tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Ruang Rapat I Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta telah dilaksanakan Uji Konsekuensi terhadap Daftar Informasi yang Dikecualikan pada **Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta**.

Uji Konsekuensi dilaksanakan sebagai dasar penetapan klasifikasi informasi yang dikecualikan melalui pengujian secara saksama terhadap konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dibuka kepada publik, dengan mempertimbangkan kepentingan perlindungan informasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Klasifikasi informasi yang dikecualikan dimaksud berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2023;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama.

Bahwa pengujian konsekuensi dilakukan dengan tahapan dan ketentuan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dokumen Informasi Publik yang di dalamnya memuat Informasi yang akan dikecualikan.
2. Mencatat Informasi yang akan dikecualikan secara jelas dan terang.
3. Menganalisis undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian.
4. Menganalisis dan mempertimbangkan konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dibuka, berdasarkan kepatutan, kesusilaan, kepentingan umum, dan/atau ukuran lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bahwa setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali sebagai berikut:

- a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
 - 1) Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
 - 2) Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
 - 3) Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
 - 4) Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
 - 5) Membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.
- b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.
- c. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:
- d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.
 - 1) Informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;
 - 2) Dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
 - 3) Jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;
 - 4) Gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi

militer;

5) Data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerja sama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;

6) Sistem persandian negara; dan/atau

7) Sistem intelijen negara.

e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:

1) Rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;

2) Rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, model operasi institusi keuangan;

3) Rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;

4) Rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;

5) Rencana awal investasi asing;

6) Proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau

7) Hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.

f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri:

1) Posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;

2) Korespondensi diplomatik antarnegara;

3) Sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau

4) Perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri

g. Informasi yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang.

h. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:

1) Riwayat dan kondisi anggota keluarga;

2) Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;

3) Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;

4) Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau

- 5) Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.
- i. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.
 - j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Berdasarkan ketentuan tersebut, rincian Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta dicantumkan dalam Lembar Pengujian Konsekuensi terlampir. Informasi Publik yang dikecualikan melalui pengujian konsekuensi ditetapkan dalam bentuk Penetapan tentang Klasifikasi Informasi Dikecualikan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 77 TAHUN 2026
TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2026

NO	KOMPONEN DATA/INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		BATAS WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
A. FUNGSI PERENCANAAN DAN ANGGARAN					
1.	Draft Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA- K/L)	1. UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i dan j; 2. UU 17/2003 tentang Keuangan Negara pasal 6 ayat 1; 3. PP 20/2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah pasal 7 ayat 3	Publik dapat mengetahui arah rencana program dan anggaran sejak awal serta memberi masukan melalui telaah publik.	Draft belum berkekuatan hukum dan masih berubah; pembukaan menimbulkan gejolak spekulasi dan penilaian absolut seolah RKA-K/L sudah pasti terealisasi.	Sampai RKA-K/L disahkan bersama DPR-RI dan ditetapkan menjadi DIPA
2.	Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)	1. UU 17/2003 tentang Keuangan Negara; 2. UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i dan j; 3. PP 21/2004 tentang Penyusunan RKA-KL.	Publik dapat mengawasi rincian komponen kegiatan dan penyerapan anggaran satuan kerja.	POK bersifat panduan internal dan masih dapat direvisi; intervensi publik atas dokumen yang belum diaudit dapat mengganggu stabilitas pelaksanaan kegiatan dan anggaran.	Sampai laporan keuangan selesai diaudit dan opini BPK diterbitkan

3.	Dokumen penawaran pengadaan	Pasal 7 Huruf b Perpres Nomor 16 Tahun 2018; Pasal 26 ayat 3 Perpres Nomor 16 Tahun 2018; Pasal 66 ayat 3 Perpres Nomor 54 Tahun 2010;	Publik dapat menilai kewajaran penawaran dan kompetisi antar penyedia.	Dokumen penawaran sebelum penetapan pemenang bersifat rahasia; pembukaan merusak kerahasiaan proses lelang dan persaingan usaha yang sehat (Pasal 17 huruf b).	Sampai penetapan pemenang lelang diumumkan
4.	Dokumen Usulan Revisi Kegiatan dan Anggaran;	UU 14/2008, Psl. 6; ayat (3) huruf e	Publik mengetahui perubahan alokasi anggaran dan alasan pergeserannya.	Masih berstatus usulan dan belum diaudit; pembukaan menimbulkan penilaian absolut seolah usulan revisi sudah disetujui.	Sampai revisi disahkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran/Kementerian Keuangan
5.	Perencanaan Kas Harian, Mingguan dan Bulanan;	UU 14/2008, Psl. 6; ayat (3) huruf e	Publik dapat memantau pola pengelolaan kas dan disiplin belanja.	Dokumen konsumsi internal yang belum diaudit; pembukaan menghasilkan informasi publik yang tidak akurat dan menyesatkan.	Sampai laporan keuangan selesai diaudit dan opini BPK diterbitkan
6.	Dokumen peserta lelang	UU 14/2008, Psl. 6; ayat (3) huruf e.	Publik dapat memverifikasi keikutsertaan penyedia dalam lelang.	Membuka identitas peserta lelang berpotensi persekongkolan dan intimidasi antar peserta, merusak persaingan usaha sehat (Pasal 17 huruf b).	Sampai penetapan pemenang lelang diumumkan
7.	Data rincian realisasi	UU No. 14 Tahun 2008, Psl.	Publik dapat	Data tahun berjalan	Sampai laporan keuangan

	anggaran tahun berjalan;	6; ayat (3) huruf e.	mengawasi penyerapan anggaran secara berkala.	belum diaudit BPK/Itjen; pembukaan menimbulkan penilaian berbeda atas angka yang belum final.	selesai diaudit dan opini BPK diterbitkan
8.	Dokumen pembayaran berupa SPP, SPM, SP2D	UU 14/2008, Psl. 6; ayat (3) huruf e.	Publik dapat menelusuri arus pembayaran sebagai bentuk transparansi pelaksanaan kegiatan.	Dokumen belum dikuasai dan belum diaudit; pembukaan mengganggu tertib pengarsipan dan berisiko tercecernya dokumen keuangan.	Sampai laporan keuangan selesai diaudit dan opini BPK diterbitkan
9.	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	Perpres 54/2010 Pasal 11	Publik dapat menilai kewajaran harga dan indikasi <i>mark-up</i> dalam pengadaan.	HPS menjadi pembanding harga penawaran; pembukaan sebelum pemasukan penawaran membuat penyedia menyesuaikan harga ke angka HPS sehingga kompetisi harga rusak dan negara dirugikan (Pasal 17 huruf b).	Sampai batas akhir pemasukan dokumen penawaran
10.	Hasil evaluasi proses pengadaan barang dan jasa	Perpres 54/2010 Pasal 11 dan 17	Publik dapat menilai akuntabilitas panitia dan hasil proses pengadaan.	Laporan merupakan pertanggungjawaban internal PPK/ULP kepada PA/KPA; pembukaan sebelum final mengganggu proses	Sampai laporan hasil pengadaan diterima dan disahkan PA/KPA

				pertanggungjawaban.	
11.	Dokumen penggunaan, pemanfaatan, pemindahantangan dan penghapusan BMN berupa surat, nota dinas, berita acara, surat keputusan.	PMK 120/PMK.06/2007 Tentang Penatausahaan BMN; Inpres 14/2008	Publik mengetahui pemanfaatan dan pemindahtanganan aset negara.	Dokumen merupakan penatausahaan internal BMN sesuai PMK 120/2007 yang tidak berhubungan langsung dengan layanan publik.	Sampai penatausahaan BMN selesai dan dilaporkan dalam Laporan BMN
12.	Dokumen pelaksanaan inventarisasi dan penilaian BMN	PP 38/2008 pengganti PP 6/2006 Permenkeu 02/PMK.06/2008 Tentang Penilaian Barang Milik Negara Menteri Keuangan.	Publik mengetahui nilai dan kondisi aset milik negara.	Nilai wajar BMN diperlukan untuk neraca, pemanfaatan, dan pemindahtanganan; pembukaan sebelum final merugikan posisi tawar pemerintah dan berpotensi kerugian negara.	Sampai penilaian BMN selesai dan nilai wajar ditetapkan
13.	BMN berupa tanah yang belum memiliki surat bukti kepemilikan untuk keperluan audit BPK/Itjen	PMK 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN Inpres 14/2008	Publik mengetahui status penguasaan tanah milik negara.	Bukti kepemilikan belum dikuasai Badan Publik; pembukaan berpotensi disalahgunakan pihak ketiga untuk mengklaim tanah negara.	Sampai terbitnya surat bukti kepemilikan atas tanah
14.	Rekening koran bendaharawan;	UU 14/2008, Psl. 6; ayat (3) huruf e.	Publik dapat menelusuri lalu lintas kas bendahara.	Belum dikuasai dan belum diaudit; memuat data transaksi keuangan yang menurut sifatnya dirahasiakan sampai	Sampai laporan keuangan selesai diaudit dan opini BPK diterbitkan

				pemeriksaan selesai.	
15.	Hasil pemeriksaan reguler, kasus, khusus, review laporan keuangan, evaluasi/pemantauan	UU 14/2008, Psl. 17; huruf a.	Publik mengetahui temuan pemeriksaan dan tindak lanjutnya.	Pembukaan sebelum proses selesai dapat menghambat proses penegakan hukum (Pasal 17 huruf a).	Paling lama 30 tahun, atau berakhir lebih awal bila telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum (Pasal 51 ayat 1 dan 2)
16.	Buku Kas Umum (BKU)	UU 14/2008, Psl. 6; ayat (3) huruf e.	Publik dapat mengawasi pencatatan penerimaan dan pengeluaran satuan kerja.	BKU adalah bukti pertanggungjawaban bendahara kepada atasan langsung dan bahan pemeriksaan; pembukaan sebelum audit mengganggu proses pemeriksaan.	Sampai laporan keuangan selesai diaudit dan opini BPK diterbitkan
17.	Buku kas pembantu (BKP)	UU 14/2008, Psl. 6; ayat (3) huruf e.	Publik dapat mengawasi rincian transaksi pembantu bendahara.	BKP adalah bukti pertanggungjawaban internal untuk kepentingan pemeriksaan; pembukaan sebelum audit mengganggu proses pemeriksaan.	Sampai laporan keuangan selesai diaudit dan opini BPK diterbitkan
18.	Dokumen-dokumen pajak	UU 14/2008, Psl. 6; ayat (3) huruf e.	Publik mengetahui pemenuhan kewajiban perpajakan Badan Publik.	Memuat data perpajakan yang dirahasiakan menurut UU Perpajakan dan belum diaudit (Pasal 17 huruf j).	Sampai selesai diaudit; selanjutnya mengikuti ketentuan kerahasiaan UU Perpajakan (Pasal 51 ayat 9)

B. FUNGSI KEPEGAWAIAN

1.	Penilaian Kinerja PNS Terdiri: SKP Evaluasi Kinerja Penilaian Kinerja	1. PP. 30 Tahun 2019; 2. PP. 49 Tahun 2018; 3. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2022; 4. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 1 Tahun 2023; 5. KMA No. 1179 Tahun 2022	Publik mengetahui capaian kinerja aparatur sebagai dasar akuntabilitas.	Memuat penilaian kekurangan dan kelebihan individu pegawai yang termasuk rahasia pribadi (Pasal 17 huruf h).	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi; dapat dibuka atas persetujuan tertulis yang bersangkutan atau bila terkait jabatan publik (Pasal 51 ayat 7 dan 8)
2.	Rekam Medis PNS	1. PP 10/1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran; 2. PP 32/1996 tentang Tenaga Kesehatan; 3. Kepmenkes No. 034/Birhub/1972 tentang Perencanaan dan Pemeliharaan Rumah Sakit; 4. Permenkes No. 749a/Menkes/Per/xii/89 tentang Rekam Medis.	Tidak ada manfaat publik yang sebanding; informasi bersifat individual.	Rekam medis adalah rahasia pribadi pasien; pembukaan melanggar hak privasi dan hanya boleh disampaikan dokter kepada pasien/keluarga (Pasal 17 huruf h).	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi; dapat dibuka atas persetujuan tertulis yang bersangkutan atau bila terkait jabatan publik (Pasal 51 ayat 7 dan 8)
3.	Nilai hasil tes mencakup tes potensi akademik, psikotes, tes kesehatan dan kebugaran, wawancara dalam rangka penyingkapan/penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (sebelum final untuk diumumkan)	PP 11/2002 tentang Pengadaan CPNS Keputusan Sekjen 77/2010	Publik mengetahui objektivitas proses seleksi CPNS.	Nilai tes masih dalam penelaahan Sekjen dan bersifat rahasia; pembukaan sebelum pengumuman resmi mengungkap rekam hasil ujian individu (Pasal 17 huruf h).	Sampai hasil seleksi diumumkan secara resmi; data nilai individu mengikuti Pasal 51 ayat 7
4.	Proses Penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	1. PP 9/2003; 2. Perka BKN 30/2007; 3. KMA 363/2002	Publik mengetahui distribusi penempatan pegawai baru.	Pembukaan proses penempatan menimbulkan keriuhan dan berpotensi konflik kepentingan sebelum	Sampai keputusan penempatan ditetapkan dan diumumkan

				keputusan final.	
5.	Proses Mutasi (Rotasi, Promosi, pindah tempat tugas) Jabatan Administrasi dan Fungsional	KMA 550/2022 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai	Publik mengetahui pola rotasi dan promosi jabatan.	Terkait kredibilitas pegawai; pembukaan alasan mutasi menimbulkan keriuhan dan berpotensi konflik kepentingan.	Sampai SK diterima yang bersangkutan dan/atau telah dilantik
6.	Dokumen Kepegawaian meliputi Data Pribadi, Biodata Elektronik, Berkas Arsip data Pegawai	PP 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak ada manfaat publik yang sebanding; data bersifat pribadi.	Memuat data pribadi pegawai yang berpotensi disalahgunakan pihak tidak bertanggung jawab (Pasal 17 huruf h).	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi; dapat dibuka atas persetujuan tertulis yang bersangkutan atau bila terkait jabatan publik (Pasal 51 ayat 7 dan 8)
7.	Keputusan Hukuman Disiplin (Hukdis), Keberatan atas Hukdis dan Peninjauan Kembali atas Hukdis Pegawai	PP 53/2010 Perka BKN 21/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri	Publik mengetahui penegakan disiplin aparatur.	Mengungkap aib pribadi pegawai dan berdampak pada kondisi psikologis yang bersangkutan (Pasal 17 huruf h).	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi; dapat dibuka atas persetujuan tertulis yang bersangkutan atau bila terkait jabatan publik (Pasal 51 ayat 7 dan 8)
8.	Keputusan tentang pemberian/penolakan izin cerai, beristri lebih dari satu dan keterangan untuk melaksanakan perceraian	PP 45/1990 tentang Perubahan atas PP 10/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil	Publik mengetahui penerapan aturan perkawinan PNS.	Memuat pertimbangan tertulis atas urusan perkawinan yang merupakan rahasia pribadi (Pasal 17 huruf h).	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi; dapat dibuka atas persetujuan tertulis yang bersangkutan atau bila terkait jabatan publik (Pasal 51 ayat 7 dan 8)
10.	Keputusan Pemberhentian Sementara karena dilakukan penahanan oleh pihak yang	PP 4/1966	Publik mengetahui status kepegawaian yang sedang	Terkait proses peradilan yang sedang berjalan; pembukaan	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi; dapat dibuka

	berwajib		berperkara.	dapat menghambat penegakan hukum dan mengungkap aib pribadi (Pasal 17 huruf a dan h).	atas persetujuan tertulis yang bersangkutan atau bila terkait jabatan publik (Pasal 51 ayat 7 dan 8)
11.	Daftar nama pejabat/pegawai yang dikenakan hukuman disiplin	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)	Publik mengetahui efektivitas penegakan disiplin di lingkungan Kemenag.	Menimbulkan kerugian moral bagi individu pejabat/pegawai, kecuali dipublikasikan oleh pihak berwenang sesuai peraturan (Pasal 17 huruf h).	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi; dapat dibuka atas persetujuan tertulis yang bersangkutan atau bila terkait jabatan publik (Pasal 51 ayat 7 dan 8)
12.	Draft SK Pengangkatan Jabatan Struktural	–	Publik mengetahui rencana pengisian jabatan struktural.	Draft belum final dan masih berpotensi berubah; pembukaan menimbulkan kegaduhan dan menghambat finalisasi pengambilan keputusan.	Sampai SK ditandatangani Pejabat Pembina Kepegawaian dan diumumkan

C. FUNGSI PENGAWASAN INTERNAL

1.	Laporan hasil pemeriksaan khusus	Inpres 15/1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan	Publik mengetahui hasil pengawasan atas dugaan penyimpangan.	Laporan ditujukan kepada aparat pengawasan fungsional sesuai Pasal 15 Inpres 15/1983; pembukaan mengganggu proses pengawasan yang sedang berjalan.	Sampai pemeriksaan selesai dan laporan bersifat <i>audited</i>
----	----------------------------------	---	--	--	--

2.	Laporan pengaduan Masyarakat individu/kolektif	1. UU 14/2008; 2. PP 61/2010 tentang Pelaksanaan UU 14/2008; 3. KMA 256/2003	Publik mengetahui responsivitas Badan Publik atas pengaduan masyarakat.	KMA 256/2003 Pasal 2 mewajibkan perlindungan pelapor; pembukaan membahayakan kerahasiaan identitas pelapor dan berpotensi fitnah (Pasal 17 huruf a dan h).	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan identitas pelapor (Pasal 51 ayat 7)
3.	Laporan Hasil Audit (LHA) Inspektorat Jenderal	KMA 207/2003, UU 14/2008, PP 61/2010 tentang Pelaksanaan UU 14/2008	Publik mengetahui temuan dan rekomendasi pengawasan internal.	LHA adalah media komunikasi auditor sesuai KMA 207/2003; pembukaan mengungkap rahasia pribadi dan menghambat penegakan hukum (Pasal 17 huruf a dan h).	Paling lama 30 tahun, atau berakhir lebih awal bila telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum (Pasal 51 ayat 1 dan 2)
4.	Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	UU 14/2008 PP 61/2010	Publik mengetahui opini dan temuan pemeriksaan keuangan negara.	Merupakan memorandum/surat antar Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan (Pasal 17 huruf i).	Paling lama 30 tahun, atau berakhir lebih awal bila telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum (Pasal 51 ayat 1 dan 2)
5.	Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	UU 14/2008 PP 61/2010	Publik mengetahui hasil pengawasan keuangan dan pembangunan.	Merupakan memorandum/surat antar Badan Publik yang menurut sifatnya	Paling lama 30 tahun, atau berakhir lebih awal bila telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk

				dirahasiakan, kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan (Pasal 17 huruf i).	umum (Pasal 51 ayat 1 dan 2)
6.	Dokumen-dokumen Pemeriksaan meliputi: Program Kerja Audit (PKA), Kertas Kertas Audit (KKA), Lembar Temuan Audit (LTA), dan Berita Acara Pemeriksaan.	PP 61/2010	Publik mengetahui metodologi dan cakupan pemeriksaan.	Pembukaan PKA/KKA membuat auditi mempersiapkan diri sebelum pemeriksaan sehingga hasil pengawasan tidak objektif.	Sampai proses pemeriksaan selesai dan laporan bersifat audited
7.	Dokumen Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Jenderal, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	PP 61/2010	Publik mengetahui progres penyelesaian temuan audit.	Dokumen bersifat rahasia; kebocoran berpotensi disalahgunakan bahkan diperjualbelikan pihak tidak bertanggung jawab.	Sampai tindak lanjut hasil audit dinyatakan selesai
D. FUNGSI HUKUM					
1.	Daftar Inventaris Masalah (DIM)	UU 14/2008 Pasal 17	Publik mengetahui pokok permasalahan hukum yang sedang ditangani.	Pembukaan dapat menghambat proses penegakan hukum yang sedang berjalan (Pasal 17 huruf a).	Paling lama 30 tahun, atau berakhir lebih awal bila telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum (Pasal 51 ayat 1 dan 2)
2.	Dokumen perkara dalam proses	UU 14/2008 Pasal 17	Publik mengetahui perkara yang melibatkan Badan Publik.	Pembukaan dapat menghambat proses penegakan hukum atas perkara yang	Paling lama 30 tahun, atau berakhir lebih awal bila telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk

				masih berproses (Pasal 17 huruf a).	umum (Pasal 51 ayat 1 dan 2)
3.	Dokumen lain-lain yang bersifat rahasia	UU 14/2008 Pasal 17	Manfaat publik tidak sebanding dengan risiko yang ditimbulkan.	Termasuk surat antar atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan (Pasal 17 huruf i).	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, atau berakhir atas putusan Komisi Informasi/pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Pasal 51 ayat 9)
E. FUNGSI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI					
1.	Konfigurasi data center	UU 14/2008 UU 11/2008	Tidak ada manfaat publik yang sebanding.	Diakses pihak tidak berhak menimbulkan kerusakan sistem jaringan dan database serta membahayakan keamanan data layanan publik.	Selama sistem masih digunakan; ditinjau ulang setiap perubahan arsitektur jaringan
2.	Konfigurasi infrastruktur jaringan komunikasi dalam data center	UU 14/2008 UU 11/2008	Tidak ada manfaat publik yang sebanding.	Diakses pihak tidak berhak menimbulkan kerusakan sistem jaringan komunikasi Badan Publik.	Selama sistem masih digunakan; ditinjau ulang setiap perubahan arsitektur jaringan
3.	Lokasi server	UU 14/2008 UU 11/2008	Tidak ada manfaat publik yang sebanding.	Pengungkapan lokasi server memudahkan akses fisik pihak tidak berhak dan merusak sistem jaringan.	Selama server masih beroperasi; ditinjau ulang bila terjadi relokasi
4.	<i>Internet Protocol/IP</i> baik privat maupun publik	UU 14/2008 UU 11/2008	Tidak ada manfaat publik yang sebanding.	Digunakan pihak tidak berhak untuk mengakses data yang menurut sifatnya	Selama alamat IP masih digunakan dalam jaringan Badan Publik

				rahasia.	
5.	Bandwidth management	UU 14/2008 UU 11/2008	Tidak ada manfaat publik yang sebanding.	Dimanfaatkan pihak tidak berhak sehingga mengganggu sistem komunikasi data Badan Publik.	Selama sistem masih digunakan; ditinjau ulang setiap perubahan konfigurasi
6.	Kode akses elektronik	UU 14/2008 UU 11/2008	Tidak ada manfaat publik yang sebanding.	Kode akses yang terbuka memungkinkan pihak tidak berhak mengakses data rahasia dan menyalahgunakan sistem.	Selama kode akses masih berlaku; berakhir saat kode diganti atau dinonaktifkan
7.	Sistem manajemen basis data	UU 14/2008 UU 11/2008	Tidak ada manfaat publik yang sebanding.	Diakses pihak tidak berhak menimbulkan kerusakan sistem manajemen database.	Selama sistem masih digunakan; ditinjau ulang setiap perubahan sistem
8.	Struktur basis data	UU 14/2008 UU 11/2008	Tidak ada manfaat publik yang sebanding.	Diakses pihak tidak berhak menimbulkan kerusakan dan manipulasi isi database.	Selama sistem masih digunakan; ditinjau ulang setiap perubahan sistem
9.	Source Code	UU 14/2008 UU 11/2008	Tidak ada manfaat publik yang sebanding.	Source code yang terbuka memudahkan eksploitasi celah keamanan dan merusak sistem yang ada.	Selama aplikasi masih digunakan dan dalam masa perlindungan hak cipta (UU 28/2014)
10.	Laporan desain aplikasi	UU 14/2008 UU 11/2008	Manfaat publik terbatas; substansi laporan tetap dapat	Desain laporan dilindungi hak cipta; pembukaan	Sesuai masa perlindungan hak cipta menurut UU 28/2014 (Pasal 51 ayat 3)

			diakses.	mengganggu perlindungan HAKI (Pasal 17 huruf b).	
11.	Basis Data Aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi)	UU 14/2008 Pasal 17 huruf b	Aplikasi dapat dipublikasikan; publik tetap memperoleh gambaran layanan.	Database menyangkut hak cipta dan hak kekayaan intelektual serta memuat data keuangan; pembukaan mengganggu perlindungan HAKI (Pasal 17 huruf b).	Sesuai masa perlindungan hak cipta menurut UU 28/2014 (Pasal 51 ayat 3)
12.	Basis Data Aplikasi Pendataan Lembaga Pendidikan Islam	UU 14/2008 Pasal 17 huruf b	Aplikasi dan data agregat pendidikan Islam tetap dapat dipublikasikan.	Database menyangkut hak cipta dan hak kekayaan intelektual serta memuat data individual lembaga; pembukaan mengganggu perlindungan HAKI (Pasal 17 huruf b).	Sesuai masa perlindungan hak cipta menurut UU 28/2014 (Pasal 51 ayat 3)
13.	Dokumentasi Aplikasi dan Sistem	UU 14/2008 Pasal 17 huruf b	Manfaat publik terbatas; informasi layanan aplikasi tetap terbuka.	Dokumentasi menyangkut hak cipta dan hak kekayaan intelektual serta memuat detail teknis sistem (Pasal 17 huruf b).	Sesuai masa perlindungan hak cipta menurut UU 28/2014 (Pasal 51 ayat 3)

F. FUNGSI PENDIDIKAN

1.	Soal Ujian Sekolah, Ujian Harian, Quis, Ujian Akhir Sekolah (UAS), dan Ujian	UU No. 20 Tahun 2003 PP No. 57 Tahun 2021	Tidak ada manfaat publik yang sebanding sebelum ujian	Pembukaan soal sebelum pelaksanaan menimbulkan	Sampai ujian selesai dilaksanakan
----	--	---	---	--	-----------------------------------

	Nasional (UN)/ujian setara lainnya serta kunci jawabannya.		dilaksanakan.	kompetisi yang tidak sehat dan merusak validitas hasil ujian.	
2.	Proses Evaluasi guru dan kegiatan belajar mengajar	UU. No 14 Tahun 2005 PP. No. 19 Tahun 2017 PP. No. 74 Tahun 2008	Publik mengetahui mutu penyelenggaraan pembelajaran.	Proses evaluasi menjadi acuan penilaian kinerja; pembukaan sebelum final berpotensi subjektif dan menimbulkan konflik kepentingan.	Sampai proses evaluasi selesai dan hasil ditetapkan
3.	Penilaian kinerja Kepala Madrasah	1. PP. 30 Tahun 2019; 2. PP. 49 Tahun 2018; 3. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2022; 4. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 1 Tahun 2023; 5. KMA No. 1179 Tahun 2022	Publik mengetahui capaian kinerja pimpinan satuan pendidikan.	Memuat penilaian kekurangan dan kelebihan individu yang termasuk rahasia pribadi (Pasal 17 huruf h).	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi; dapat dibuka atas persetujuan tertulis yang bersangkutan atau bila terkait jabatan publik (Pasal 51 ayat 7 dan 8)
G. LAIN-LAIN					
1.	Cetak Biru (<i>Blue Print</i>) gedung Kementerian Agama dan seluruh Satuan Kerja di bawahnya.	UU No. 28 Tahun 2014	Manfaat publik terbatas pada informasi bangunan.	Blue print dilindungi hak cipta dan memuat detail struktur bangunan yang berpotensi disalahgunakan untuk mengancam keamanan aset negara (Pasal 17 huruf b).	Selama gedung masih digunakan; dan sesuai masa perlindungan hak cipta atas rancangan (UU 28/2014)
2.	Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia	UU 43/2009	Publik memperoleh akses arsip setelah	Arsip yang menurut sifatnya rahasia;	Sesuai jadwal retensi arsip yang berlaku (Pasal 51 ayat 9)

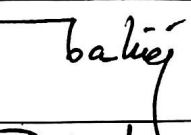
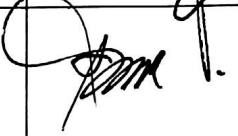
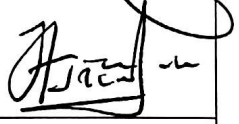
			masa kerahasiaan berakhir.	pembukaan sebelum batas waktu bertentangan dengan ketentuan kearsipan (Pasal 17 huruf j).	
3.	Rencana pembelian tanah dan property	UU 14/2008 Pasal 17 huruf e angka 4.	Publik mengetahui rencana pengembangan aset Badan Publik.	Pembukaan rencana pembelian menimbulkan gejala spekulasi harga tanah dan merugikan keuangan negara (Pasal 17 huruf e).	Sampai transaksi selesai dan akta jual beli ditandatangani
4.	Risalah rapat, slide presentasi, dokumen, rekaman suara, dan transkripsi rekaman suara dari pelaksanaan rapat-rapat yang bersifat rahasia	UU 14/2008	Publik mengetahui proses pengambilan keputusan pimpinan.	Bersifat rahasia sampai batas waktu tertentu; pembukaan hanya dimungkinkan atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan (Pasal 17 huruf i).	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, atau berakhir atas putusan Komisi Informasi/pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Pasal 51 ayat 9)
5.	Bahan rapat, risalah rapat pimpinan yang bersifat rahasia	UU 14/2008	Publik mengetahui arah kebijakan yang dibahas pimpinan.	Bahan dan risalah rapat pimpinan bersifat rahasia; pembukaan hanya dimungkinkan atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan (Pasal 17 huruf i).	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, atau berakhir atas putusan Komisi Informasi/pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Pasal 51 ayat 9)
6.	Matriks tindak lanjut Rapat Koordinasi Pimpinan (Rakorpim) yang bersifat rahasia	UU 14/2008	Publik mengetahui rencana tindak lanjut hasil rapat koordinasi.	Belum berkekuatan hukum dan masih dapat berubah; pembukaan	Sampai keputusan hasil rapat ditetapkan dan berkekuatan hukum

				menimbulkan gejala spekulasi di masyarakat.	
7.	Hasil penelitian/penerbitan yang belum final dan belum memperoleh koreksi serta Persetujuan Pimpinan untuk dipublikasikan	UU 14/2008 UU 19/2002	Publik memperoleh hasil penelitian lebih cepat.	Hasil belum final dan belum terkoreksi; pembukaan mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan berpotensi menyesatkan (Pasal 17 huruf b).	Sampai hasil penelitian final, disetujui pimpinan, dan dipublikasikan
8.	Hasil penelitian di daerah konflik	—	Publik mengetahui kondisi sosial keagamaan di daerah konflik.	Berpotensi disalahgunakan pihak tidak bertanggung jawab dan memperluas eskalasi konflik.	Selama jangka waktu yang dibutuhkan sesuai penetapan pimpinan Badan Publik (Pasal 51 ayat 4 dan 5)
9.	Hasil pemetaan daerah rawan konflik	—	Publik mengetahui titik rawan konflik untuk kewaspadaan bersama.	Pembukaan berpotensi memunculkan masalah SARA dan stigmatisasi wilayah.	Selama jangka waktu yang dibutuhkan sesuai penetapan pimpinan Badan Publik (Pasal 51 ayat 4 dan 5)
10.	Hasil penelitian penyimpangan agama	—	Publik memperoleh kajian ilmiah atas dinamika keagamaan.	Berpotensi menimbulkan gejala dan ketegangan di masyarakat.	Selama jangka waktu yang dibutuhkan sesuai penetapan pimpinan Badan Publik (Pasal 51 ayat 4 dan 5)
11.	Data detail peserta pengadaan barang dan jasa	pasal 17 huruf b UU KIP	Publik mengetahui jumlah dan kualifikasi peserta pengadaan.	Data detail peserta menyangkut persaingan usaha dan berpotensi persekongkolan (Pasal 17 huruf b).	Sampai proses pengadaan selesai dan pemenang diumumkan
12.	Data detail Pelaku Usaha	pasal 17 huruf b UU KIP	Publik mengetahui	Data detail pelaku	Sesuai ketentuan perlindungan

	Halal		gambaran umum pelaku usaha mitra Badan Publik.	usaha menyangkut persaingan usaha dan rahasia bisnis pihak ketiga (Pasal 17 huruf b).	rahasia dagang dan persaingan usaha (Pasal 51 ayat 3)
--	-------	--	--	---	---

Berita acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya dan ditandatangani para Pejabat Struktural Eselon II dan III selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dibuat di Yogyakarta,

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN PPID	TANDA TANGAN
1	Dr. H. Ahmad Bahiej, SH, M.Hum.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY	Atasan PPID Unit	
2	H. Abd Su'ud, S.Ag., M.Si.	Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY	PPID Unit	
3	H. Nurhuda, S.Ag., M.Si.	Kepala Bidang Penerangan Agama Islam dan Zakat Wakaf	PPID Pelaksana	
4	H. Nurhuda, S.Ag., M.Si.	Plt. Kepala Bidang Urusan Agama Islam	PPID Pelaksana	
5	H. Sidik Pramono, S.Ag., M.Si.	Kepala Bidang Pendidikan Madrasah	PPID Pelaksana	
6	H. Aidi Johansyah, S.Ag., M.M.	Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam	PPID Pelaksana	
7	H. Abd Su'ud, S.Ag., M.Si.	Plt. Pembimbing pada Pembimbing Masyarakat Kristen	PPID Pelaksana	
8	Kristoforus Sinselius, S.S	Pembimbing pada Pembimbing Masyarakat Katolik	PPID Pelaksana	
9	Didik Widya Putra, S.E., M.M.	Pembimbing pada Pembimbing Masyarakat Hindu	PPID Pelaksana	
10	Pandu Dinata, S.Kom., M.Pd.	Pembimbing pada Pembimbing Masyarakat Buddha	PPID Pelaksana	